

DAFTAR PUSTAKA

- Adamy, M. (2016). Manajemen sumber daya manusia: Teori, praktik, dan penelitian.
- Adi, A. P. (2024). Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Ponjong berdasarkan Shariah Enterprise Theory (Studi pada Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul). Universitas Islam Indonesia.
- Adina, H. G. S. (2021). Sikap remaja tentang pendidikan seks dalam menghadapi pubertas di Posyandu Remaja Desa Lang-Lang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(3), 229-237.
- Afandi, & Basuki, U. (n.d.). Menemukan konsep ideal hubungan pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Afandi, A., & Basuki, U. (2023). Menemukan konsep ideal hubungan pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), 1–15.
- Ahmad, R. (2023). Rekontruksi Regulasi Pegelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Universitas Islam Sultan Agung).
- Ajeng, L. E., Pramudiana, I. D., & Sholichah, N. (2023). Evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PAUD. *Soetomo Administrasi Publik*, 263–268.
- Alfana, G. Q. (2020). Model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 112.
- Alfandy, M. A. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan desa dalam perspektif siyash dusturiyah. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Alkhairi, A. R., & Alpian, Y. (2024). Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) desa. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 3(1), 4670–4674.

- Al-Qur'an Surat Saba' [34]: 15. Al-Qur'an dan Terjemahan. Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House.
- Anggerwati, A. I. (2022). Pengelolaan keuangan desa: Studi fenomenologi (Pada desa di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 8(4), 343–349.
- Anisah, N., Sartika, M., & Kurniawan, H. (2021). Penggunaan media sosial Instagram dalam meningkatkan literasi kesehatan pada mahasiswa. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 94–112.
- Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61–75.
- Aslinda. (2023). Model kebijakan publik dan teori perubahan kebijakan (Edisi revisi). K-Media Yogyakarta.
- Asmanurhidayani, A., Darwis, D., & Satriani, S. (2023). Pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada kantor Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(2), 148–164.
- Cohen, M. (2014). *Theoretical perspectives on law and society*. New York: Routledge, pp. 23-45. Lihat juga dalam McCauley, J. H. (2019). The role of paradigms in the law. *Law & Society Review*, 53(1), 100-115.
- D.S. van Meter & C.E., van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process A Conceptual Framework", *Administration & Society*, 6(4), 445-488. hlm. 447
- Daraba, D. (2017). Pengaruh program dana desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Sosiohumaniora*, 19(1), 52–58.
- Darmoko, H. W. D., & Rochman, F. (2023). Potret implementasi pajak dana desa di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(1), 46-55.
- Dewi, R. A., Ramadhanti, W., & Wiratno, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca

- Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(4), 311–327.
- Dewi, R. K., et al. (2020). Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas. The SMERU Research Institute.
- Dewi, S. P. K. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Efendi, H. (2022). Kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Mandiri dan Desa Tertinggal (studi di Desa Gunung Rejo dan Desa Babakan Loa Kabupaten Pesawaran).
- Enggok, M. S., & Saputra, R. W. (2023). Analisis Kebijakan Publik Teori & Konsep. Global Eksekutif Teknologi.
- Fendri, A. (2023). Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Fernanda, M., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi dan otonomi daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2409–2418.
- Finnis, J. (1980). *Natural law and natural rights*. Oxford: Clarendon Press, pp. 1-25.
- Finnis, J. M. (1980). The natural law: A brief introduction. *Harvard Law Review*, 93(5), 100-120.
- Flambonita. Sinkronisasi pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kehutanan di daerah (studi penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- Haboddin, M. (2017). *Memahami kekuasaan politik*. Universitas Brawijaya Press.
- Hahif, A. K. (2021). *Akuntabilitas kinerja perguruan tinggi: Konsep, teori, dan kasus*.

- Hakim, A., & Herlina, N. H. (2018). Manajemen kurikulum terpadu di Pondok Pesantren Modern Daarul Huda Banjar. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1), 111–132.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43.
- Hamdi, M., et al. (2023). Buku putih pemerintahan Indonesia.
- Harahap, et al. Manajemen sumber daya manusia.
- Harahap, M., et al. (2023). Elit politik di Indonesia: Akar dan dampak penyalahgunaan hak berdemokrasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2149–2160.
- Harahap, T. K., et al. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Tahta Media.
- Hart, H. L. A. (1994). The concept of law. Oxford: Clarendon Press, pp. 1-30.
- Dworkin, R. (1986). The model of rules. *The University of Chicago Law Review*, 47(3), 14-34.
- Hasibuan, M. S. P. (2008). Manajemen sumber daya manusia.
- Hasima, R. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Lakidende Law Review*, 3(2), 579–591.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa. *JRAK*, 12(2), 100–108.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas kebijakan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086–1095.
- Isharyanto, & Prasetya, D. E. J. (2021). Hukum pemerintahan desa: Perspektif, konseptualisasi dan konteks yuridis. *Absolute Media*.
- Jaya, I. M. L. M. (2019). Determinan akuntabilitas keuangan dana desa pasca penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi*, 9(3), 201-218.

- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1).
- Karmila, R. H., et al. (2024). Akibat Hukum Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Media Akademik (JMA*, 2(10).
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law*. Berkeley: University of California Press.
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 11–23.
- Kuswanto, J. (2019). Penerapan e-commerce berbasis website sebagai media penunjang promosi UKM Lamleathers. In *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat* (pp. 211–216).
- La Suhu, B., et al. (2023). Kinerja pegawai dalam pelayanan logistik pasca bencana pada kantor BPPD Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 110–123.
- Leach, M., et al. (n.d.). *Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan*.
- Llewellyn, K. N. (1960). *The bramble bush: On our law and its study*. New York: Oceana Publications.
- Lukman. (n.d.). *Hukum otonomi desa: Mewujudkan kemandirian desa menuju masyarakat sejahtera*.
- Lusdani, W., & Ta'dung, Y. L. (n.d.). *Village Funds: Paradox In Making Financial Accountability*.
- Maarif, F. I. (2023). Analisis implementasi model pembelajaran Project Based Learning yang berorientasi pada kreativitas dalam pembelajaran PPKn di sekolah dasar (Thesis, Universitas Negeri Jakarta).
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi

- masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill,"* 8(2).
- Maguni, W., & Maupa, H. (2018). Teori Motivasi, Kinerja Dan Prestasi Kerja Dalam Al-Quran Serta Pleksibilitas Penerapannya Pada Manajemen Perbankan Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 100–124.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71–84.
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi good government sebagai upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 512–528.
- Meithiana, I., & Ansory, H. (2019). Manajemen sumber daya manusia. Indonesia Pustaka.
- Muhamad, N. A. (2023). Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (UIN Raden Intan Lampung).
- Mulyanto, M. (2015). Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa di Bali dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27(3), 418–431.
- Naibaho, R., Siregar, H., & Silitonga, T. D. B. (2021). Implementasi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Lobusiregar II Kecamatan Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 80–92.
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang program bela pengadaan. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1-16.
- Nitaria, A. (2023). Pergeseran birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.

- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis kebijakan publik*. Makassar: Publisher UNM.
- Nurkholis, A. (2018). Teori pembangunan sumberdaya manusia: Human capital theory, human investment theory, human development theory, sustainable development theory, people centered development theory.
- Pabesak, A. S., & Pasolang, Y. (2024). Tugas dan fungsi kepala desa madani dalam pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 4(2), 360–371.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229.
- Pasoloran, O. (n.d.). Dana Desa/Lembang: Paradoks Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan. In *Prosiding Seminar Nasional BK-PTKI*.
- Pound, R. (1934). The scope and purpose of sociological jurisprudence. *American Bar Association Journal*, 20(1), 16-22.
- Pradana, I. S., Anshari, T., & Widodo, I. (2024). Inkonsistensi terhadap pengakuan desa adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *RechtJiva*, 290–308.
- Prasetyo, Y., Suwardi, & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Jl@P*, 12(2).
- Purnamasari, S., et al. (2024). Penerapan Hak Inisiasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 139–150.
- Raz, J. (2002). Legal positivism. In *The Oxford handbook of jurisprudence and philosophy of law* (pp. 45-69).

- Regier, E. F. (2023). Breaking the law of pluralism: Toward a reconstruction of legitimate judicial decision making in political science (Doctoral dissertation, University of Pennsylvania).
- Regif, S., Naif, Y., & Botha, H. (2023). Good Governance Dalam Praktek Pemerintahan Desa: (Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 229–246.
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
- Rizhti, R. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membangun Infrastruktur Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (UIN Raden Intan Lampung).
- Robi, A. (2023). Pengawasan penyelenggaraan asas desentralisasi dalam pemerintah daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Sosio Akademika*, 12(2), 54–68.
- Rohaeni, H. (2016). Model gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja pegawai. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4(1), 32-47.
- Rohman, H., & Kurniawan, T. (2023). Analisis naratif kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia 2005-2025. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1).
- Samudra, A. A., Suradika, A., & Kadarisman, M. (2023). Implementasi kebijakan publik & evidence-base policy. *Samudra Biru*.
- Sari, M. W., Aima, M. H., & Elfiswandi, E. (2023). Tingkat kesejahteraan masyarakat pariwisata bahari: Teori, model dan implementasi. CV. Gita Lentera.
- Setiawan, A. D., Bastian, A., & Seswandi, A. (2023). Pengaruh kompetensi, kepuasan kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja pengurus BUMDesa di Kecamatan Bukit Batu. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen*, 2(1), 84–94.

- Sidi, N. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Terhadap Otonomi Desa Di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(2), 95–100.
- Sidi, N., et al. (2024). Sinkronsasi Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan Di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah). *Lex LATA*, 2(2).
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). Efektivitas Implementasi Dan Dampak Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
- Solehan, S., & Sukresno, S. (2024). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara). *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, 15(3).
- Suaib, H., et al. (2022). Pengantar kebijakan publik. *Humanities Genius*.
- Suandi, I. W. (2010). Eksistensi kebijakan publik dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 14-28.
- Sulistyowati, Y., Kia, M. F. A., & Indrihastuti, P. (2024). Analisis Implementasi Akuntansi Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oro Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu (Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.
- Tahir, A. (2023). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. *PATEN*, 8(89).
- Utami, N. F. T., et al. (2022). Analisis Kesalahan Sintaksis Pada Cerpen Berjudul "Warisan Untuk Doni" Karya Putu Ayub. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*, 1(1), 88–101.

- Viodelf, M. A. (2024). Pelaksanaan pengelolaan bantuan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Wahyuvi, N. T., & Kriyantono, R. (2020). Pola Komunikasi Pembangunan Terkait Pengelolaan Program Inovasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Heritage*, 8(2), 92–106.
- Yahya, F. D. L., & Dengo, S. (2018). Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Transportasi Online Dengan Transportasi Konvensional Studi Kasus Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65).
- Yunita, S. (2023). Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah (UIN Raden Intan Lampung).
- Zulfadil, Z., et al. (2023). Kajian Alternatif Model Kelembagaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Di Kota Pekanbaru. *KURS: Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, 8(1), 15–22.